

EXECUTIVE SUMMARY

JUDUL : MODEL INOVASI PRODUK PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI PENDEKATAN *COMMUNITY BASED TOURISM* DI PROVINSI JAMBI

A. LATAR BELAKANG

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu sektor andalan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Berkembangnya sektor pariwisata akan memberikan *multilier effect* pada sektor-sektor lainnya. Potensi dan keunikan kearifan lokal (*local wisdom*) Provinsi Jambi berpeluang untuk dikemas menjadi suatu produk pariwisata yang berdaya saing. Hal ini didukung oleh dua desa wisata yang telah eksis di Provinsi Jambi, yang memiliki keunikan tersendiri. Disisi lain terdapat delapan embrio desa wisata yang sedang berproses menjadi desa wisata dan tersebar di Kabupaten Kerinci, Muaro Jambi, Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Selain itu telah terbentuk beberapa Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di Provinsi Jambi, tentunya sangat mendukung tumbuhnya paket-paket wisata berbasis kemasyarakatan. Menurut data Dinas Pariwisata Provinsi Jambi (2016) telah terdapat 21 POKDARWIS di Provinsi Jambi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Begitu juga dengan berkembangnya *homestay* di wilayah destinasi wisata, hingga tahun 2016 telah terdapat sebanyak 28 *homestay* yang keberadaannya tersebar di desa wisata di Provinsi Jambi. Potensi-potensi ini tentunya akan memberikan stimulus untuk memulai pengelolaan pariwisata di Provinsi Jambi melalui pendekatan pengelolaan secara kemasyarakatan atau CBT.

Namun sangat disayangkan bahwa kearifan lokal di Provinsi Jambi yang penuh keunikan dan keragaman sampai saat ini belum dikemas menjadi paket wisata yang menarik. Belum optimalnya ekspose atau interaksi dari kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Jambi, menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan paket-paket wisata yang berbasis kearifan lokal. Pengelolaan pariwisata yang optimal dengan dilakukan secara bersama oleh multipihak akan berdampak baik dalam pergerakan ekonomi daerah.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Mengidentifikasi kearifan lokal yang mendukung sektor pariwisata dan mengukur kesiapan masyarakat desa dalam pengelolaan pariwisata dengan pendekatan *Community Based Tourism* di Provinsi Jambi; 2) Mengembangkan strategi program peningkatan ekonomi masyarakat melalui pariwisata berbasis kearifan lokal dengan pendekatan *Community Based Tourism*; 3) Merancang inovasi pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal melalui Pendekatan *Community Based Tourism* di Provinsi Jambi dengan instrumen Institusi Multi Pihak; 4) Merancang model inovasi produk pariwisata berbasis kearifan lokal melalui Pendekatan *Community Based Tourism* di Provinsi Jambi.

C. METODE PENELITIAN

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *prospective analysis* yaitu menggunakan secara bersamaan tools MICMAC dan MACTOR dalam menentukan variabel kunci dan memetakan kekuatan antar aktor dalam mengembangkan pariwisata, dan menggunakan tools Promethee untuk menentukan strategi program peningkatan ekonomi masyarakat melalui pariwisata berbasis kearifan lokal.

D. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menyimpulkan : 1. a) Provinsi Jambi memiliki destinasi wisata yang tidak kalah menarik dari provinsi lain di Indonesia. Namun pengelolaan pariwisata yang tidak terintegrasi dan secara parsial belum memberikan hasil yang optimal. Pada konteks kearifan lokal yang mendukung sektor pariwisata di Provinsi Jambi, walaupun banyak memiliki spesifik namun belum terekspose/berinteraksi antara potensi alam, budaya dan modal sosial; 1. b) Dilihat dari 4 kriteria penilaian kesiapan desa wisata, kriteria partisipasi masyarakat memperoleh bobot tertinggi (0,46) sedangkan bobot infrastruktur merupakan yang terendah (0,14). Namun secara keseluruhan keempat kriteria ini harus ada dan saling melengkapi. Berdasarkan analisis, Desa Jernih Jaya di Kabupaten Kerinci memperoleh nilai paling tinggi (7,0) mengungguli 4 desa wisata lainnya yang dinilai, dan skor Desa Jernih Jaya berbeda tipis dengan Desa Baru Kabupaten Muaro Jambi. Secara umum kelima desa masih menonjolkan keindahan alam, belum memunculkan secara optimal kekayaan budaya lokal dan keunikan kehidupan sehari-hari warga masyarakat; 2.a) Strategi program peningkatan ekonomi masyarakat melalui pariwisata berbasis kearifan lokal pada penelitian ini ditawarkan empat strategi yaitu strategi pengelolaan secara eksisting, pengelolaan oleh pemerintah (*government lead*), pengelolaan oleh masyarakat (*community lead*), dan Institusi Multi Pihak (IMP).

Hasil analisis data dengan pendekatan analisis Promethee menyimpulkan bahwa strategi terbaik dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Jambi adalah melalui kelembagaan IMP. Kelembagaan ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan perekonomian melalui pendataan masyarakat, aspek sosial, lingkungan, dan kriteria pariwisata. Strategi kedua terbaik diperoleh melalui strategi *community lead*, karena strategi ini juga mendukung dalam peningkatan pendapatan masyarakat meski tidak setinggi dalam strategi IMP. Strategi pengelolaan eksisting sebaiknya tidak dilanjutkan karena tidak memiliki keunggulan dari berbagai kriteria yang dinilai; 2.b) Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal sangat ditentukan oleh interaksi antar aktor dan faktor. Interaksi faktor dipetakan dalam pemetaan MICMAC yang menunjukkan bahwa sembilan variabel pariwisata menempati posisi yang berbeda dalam konteks pengaruh dan ketergantungan dalam pengembangan pariwisata. Kesembilan variabel tersebut adalah pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, konflik sosial, dampak lingkungan, atraksi, akses, amenietis, dan ancillary. Variabel akses merupakan variabel penting dari sisi input sementara variabel pendapatan masyarakat merupakan variabel penting dari sisi *output*. Variabel pendapatan daerah menjadi variabel *relay* yang memungkinkan tidak stabilnya sistem pariwisata berbasis kearifan lokal, karena tujuan peningkatan pendapatan daerah yang tinggi saja menyebabkan sulitnya pariwisata lokal untuk berkembang; 2.c) Berdasarkan pemetaan interaksi antar aktor atau *stakeholder* pengelola pariwisata di Provinsi Jambi yaitu : Aktor dengan pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah . yaitu Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal Daerah, Dinas Perindag, Diskominfo, PHRI, HPI, dan Dinas Pemberdayaan (DP3K); Aktor yang memiliki pengaruh tinggi secara berurut adalah Dinas Pariwisata, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Penanaman Modal Daerah;Aktor yang memiliki kecenderungan tingkat ketergantungan yang tinggi dan pengaruh yang sangat rendah yaitu Kades, masyarakat, petugas parkir, warung dan pedagang informal (bagian dari UMKM yang menerima manfaat dari berkembangnya sektor pariwisata);Aktor yang memiliki pengaruh dan ketergantungan yang sangat kecil adalah Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas PU, dan Dinas Pendidikan;Sedangkan aktor yang memiliki ketergantungan terendah adalah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI); d) Selanjutnya dari sembilan tujuan pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal (pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, konflik sosial, konflik/dampak lingkungan, atraksi, akses, amenietis, dan ancillary), tergambar bahwa seluruh *stakeholder* setuju dengan sembilan tujuan pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal secara kolaboratif. Sedangkan derajat konvergensi (kesepakatan dan persetujuan) antar aktor dan derajat divergensi (ketidaksetujuan) antara aktor, menunjukkan konvergensi yang tinggi antar aktor. Pada kasus ini aktor yang berkonvergensi paling besar antara satu sama lain yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Balai Cagar Budaya, ASITA, Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan masyarakat; 3.Inovasi pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal melalui pendekatan *Community Based Tourism* lebih optimal dilaksanakan melalui skema Institusi Multi Pihak. *Output* dari melaksanakan skema IMP yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat dengan sentuhan inovasi paket wisata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, dan meningkatkan pendapatan serta daya saing daerah; 4.Model inovasi produk pariwisata berbasis kearifan lokal melalui pendekatan *Community Based Tourism* yang dikelola secara kolaboratif sebagai *rule of the game* atau acuan dalam pengembangan desa wisata. Dimana produk pariwisata yang terdiri dari barang dan jasa. Inovasi barang terdiri dari inovasi yang berkaitan dengan variasi produk dan inovasi yang berkaitan dengan *skill*. Inovasi variasi produk dapat berupa produk *high volume low value* (produk dengan volume masal namun bernilai rendah) atau produk *high value low volume* (produk spesifik yang bernilai tinggi). Inovasi ini membutuhkan dukungan sosial dan lingkungan. Kemudian untuk inovasi yang berkaitan dengan *skill* diarahkan pada keragaman ketrampilan mengolah barang dan ketrampilan menciptakan produk-produk yang berbahan baku lokal, berupa penciptakan nilai tambah dengan ketrampilan memasarkan dan memperbaharui produk, serta ketrampilan mengubah produk *low value* seperti produk daur ulang atau produk lokal yang awalnya tidak bernilai menjadi produk bernilai ekonomi. Selanjutnya Inovasi jasa merupakan layanan yang harus disertai *hospitality* atau keramahtamahan. Semua inovasi ini harus didukung dengan strategi sosialisasi dan pemasaran, sehingga akan menghasilkan produk pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

E. REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini :1. Pengembangan akses dan pengembangan yang berkaitan dengan atraksi wisata serta karakteristik wisata dan dampak lingkungannya, harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PU, serta Dinas Penanaman Modal bersinergi melalui pengembangan investasi yang berbasis kearifan lokal dengan melibatkan masyarakat. Investasi ini bersifat *demand side* atau dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat;

2. Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk berlomba dan menjadikan demam desa wisata sebagai program unggulan daerah. Program ini disesuaikan dengan potensi budaya dan kearifan lokal masing-masing, dan menjadikannya sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa; 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjalankan fungsi pariwisata di kabupaten/kota agar memasarkan desa wisata yang telah mapan, dan secara bersama merancang sebuah paket wisata dengan titik singgah pada tiga desa wisata atau lebih. Hal ini akan memperkaya pengalaman dan efisiensi biaya perjalanan wisatawan; 4. Guna mengakselerasi pertumbuhan desa wisata di Provinsi Jambi, maka Balitbangda Provinsi Jambi bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi disarankan membentuk Kelompok Kerja Rintisan Desa Wisata yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, Masyarakat, dan Aktor Pariwisata lainnya; 5. Pemerintah Desa Jernih Jaya Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci disarankan mengklarifikasi status lahan Rawa Bento sebagai objek andalannya yang berada di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Hal ini tentu saja untuk menghindari konflik lingkungan terkait dengan pengembangan desa wisata; 6. Pendapatan masyarakat pada penelitian ini menjadi variabel *output* yang utama, maka perlu diperhatikan skema peningkatan pendapatan masyarakat yang berkelanjutan misalnya melalui pengembangan koperasi dan kelembagaan desa seperti BUMDES atau peningkatan tabungan masyarakat desa dari hasil pariwisata. Pada konteks ini, pengelolaan desa wisata disarankan terintegrasi dengan BUMDes dan CSR. Sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh terkumpul di satu lembaga dan selanjutnya didistribusikan kepada semua warga desa, sekaligus menghindari potensi perpecahan/ konflik antar warga akibat saling berebut manfaat dari kunjungan wisatawan. Terkait hal ini, Dinas Koperasi dan Pemerintahan Desa agar bersinergi dalam upaya pengaturan manfaat ekonomi; 7. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota disarankan untuk memfasilitasi dalam pembangunan infrastruktur penunjang desa wisata. Sedangkan pemerintah desa sebaiknya didorong memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan desa wisata dan menyinergikan dengan BUMDes maupun CSR di wilayah masing-masing; 8. Dari hasil MACTOR menunjukkan bahwa konvergensi antar aktor pemerintah menjadi salah satu kunci dalam pengembangan pariwisata. Disarankan sinergi kelembagaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan memberikan kewenangan kepada suatu kelembagaan non formal atau IMP dalam mengelola wisata melalui skema regulasi (peraturan daerah atau desa) yang lebih kuat, serta memberikan insentif kepada lembaga pengelola agar bekerja sama secara berkesinambungan dalam mengelola pariwisata berbasis kearifan lokal. Disamping itu, nomenklatur OPD Pariwisata yang statis dan tidak mencerminkan pariwisata pada nomenklatur menjadi pertimbangan untuk ditinjau. Hal ini untuk menghindari terjadinya hambatan ketika mengajukan penganggaran terkait pariwisata; 9. Pemerintah kabupaten/kota disarankan mengimplementasi skema pengelolaan wisata lokal melalui Institusi Multi Pihak (IMP), agar pengelolaan pariwisata dapat dilakukan secara optimal dibandingkan dengan pengelolaan secara parsial. IMP dilakukan melalui proses partisipatif yakni dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, dialog, dan permusyawaratan antar pihak. Hasil sosialisasi ini kemudian harus dikukuhkan melalui regulasi (Perda Kab/Kota atau Peraturan Desa). Tahap berikutnya adalah membuat peta jalan terkait dengan pendanaan, *benefit sharing* (pembagian manfaat), *cost sharing* (berbagi risiko) dan pengelolaan yang berkelanjutan (siapa melakukan apa); 10. Implementasi pengembangan inovasi produk harus dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan produk-produk unggulan wisata lokal yang dikaitkan dengan sisi permintaan dan penawaran. Badan Litbang Provinsi dankabupaten/kota bersinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan kabupaten/kota dalam pemetaan produk unggulan wisata, dan kemudian dijadikan acuan untuk pengembangan inovasi produk dan inovasi *skill* melalui pelatihan, peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran, serta pemetaan distribusi rantai pasok dari produk yang akan dikembangkan. Inovasi produk ini harus disertai dengan uji pasar dan valuasi produk secara berkala sehingga pariwisata berbasis kearifan lokal ini bersifat adaptif dan berkesinambungan; 11. Guna menghindari dampak negatif dari pengembangan pariwisata, disarankan menerapkan konsep “Halal *tourism*”. Keseluruhan konteks terkait dengan kebijakan pariwisata daerah menjadi peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai inisiator; 12. Memasukkan kebijakan pengembangan pariwisata daerah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi maupun visi dan misi pemerintah kabupaten/kota.

Tim Peneliti :

Ketua : Dr. Novita Erlinda, SE, MAP
Anggota : Dr. Asnelly Ridha Daulay
Weni Lestari, SP
Arni Diana, SE